



MODERASI KETERBUKAAN PERDAGANGAN PADA PENDAPATAN PER KAPITA DAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI ASEAN-5

Dian Irsalina Listikarini¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

1) dian.irsalina@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

2) suparnawijaya@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Tax performance in the Southeast Asia, especially the ASEAN-5 which consists of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, is still relatively low below the "tipping point" according to the World Bank with an average of tax revenue only by 13%. Therefore, it is important to study the concept of tax performance in more depth. This research was conducted to examine the moderation of trade openness on per capita income and Foreign Direct Investment on tax revenues. This study uses panel data on ASEAN-5 countries in the 2008-2018 period. The statistical method used is a quantitative method with multiple linear regression. Based on panel model testing, Pooled Least Square is the best model. The results show that all independent variables simultaneously affect tax revenue.. Partially, per capita income has a significant positive effect on tax revenues and after being moderated by the trade openness variable it turns out to weaken the positive relationship between income per capita and tax revenues. Meanwhile, FDI, both partially and after being moderated by the trade openness variable, has no significant effect on tax revenues. Based on the results of this study, comprehensive and appropriate policies are needed by each country in ASEAN-5 so that trade openness can increase tax revenues and strengthen the relationship between per capita income and FDI on tax revenues.

Keywords: FDI, Income per Capita, Tax Revenue, Trade Openness

Abstrak

Kinerja perpajakan di wilayah Asia Tenggara, khususnya ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, masih relatif rendah di bawah "titik kritis" menurut Bank Dunia dengan rata-rata penerimaan pajak hanya sebesar 13%. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari konsep kinerja perpajakan secara lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk menguji moderasi keterbukaan perdagangan pada pendapatan per kapita dan *Foreign Direct Investment* terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data panel terhadap negara ASEAN-5 pada periode 2008-2018. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Berdasarkan pengujian model panel, *Pooled Least Square* merupakan model yang terbaik. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak dan setelah dimoderasi dengan variabel keterbukaan perdagangan ternyata memperlemah hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan penerimaan pajak. Sementara itu, FDI baik secara parsial maupun setelah dimoderasi dengan variabel keterbukaan perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tepat oleh setiap negara di ASEAN-5 agar keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Investasi Asing Langsung (FDI), Keterbukaan Perdagangan, Pendapatan per Kapita, Penerimaan Pajak

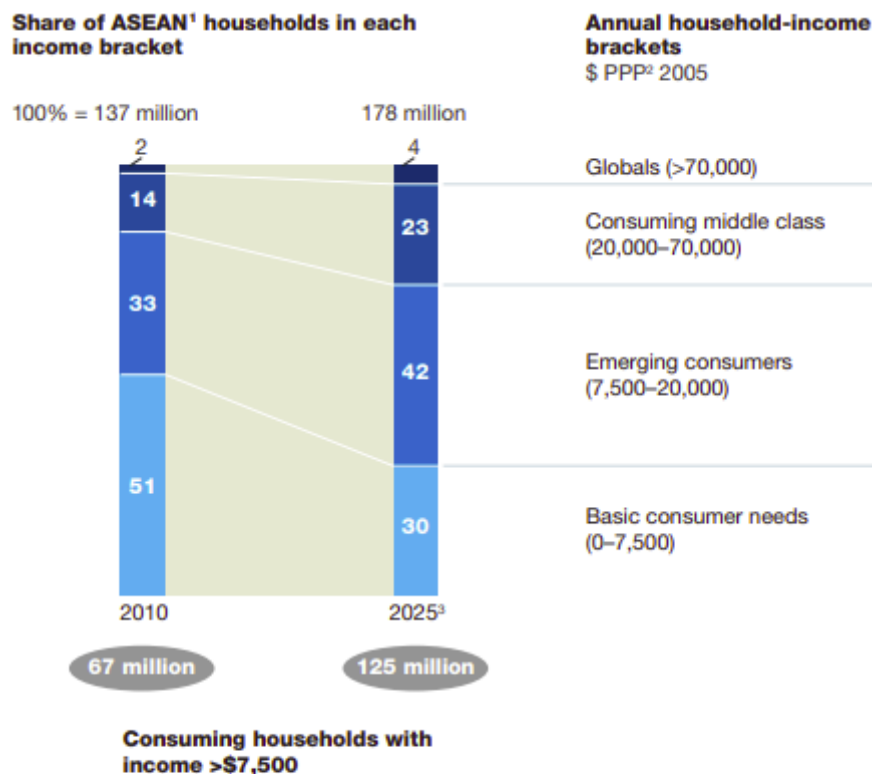
PENDAHULUAN

Kinerja perpajakan di Asia Tenggara masih relatif rendah, tidak terkecuali untuk ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dimana kelima negara tersebut termasuk dalam *mid-sized*, perekonomian terbuka, dan sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi negara lain seperti Amerika Serikat (Han & Ng, 2011). Rata-rata penerimaan pajak di negara-negara tersebut hanya sekitar 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2008 hingga 2018. Sementara, Bank Dunia menyatakan bahwa "titik kritis" dari penerimaan pajak suatu negara adalah sebesar 15% dari PDB (Junquera-Varela & Haven, 2018). Penerimaan pajak di atas ambang batas ini dipandang sebagai elemen penting untuk



pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Pemikiran ini sejalan dengan studi oleh Gaspar et. al. (2016) yang secara empiris membuktikan bahwa negara dengan penerimaan pajak di atas 15% dari PDB dapat mencapai pendapatan per kapita 7,5% lebih tinggi dari yang diharapkan selama sepuluh tahun. Kinerja perpajakan pada level ini memastikan bahwa negara memiliki uang yang mereka butuhkan untuk berinvestasi di masa depan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari konsep kinerja perpajakan secara lebih mendalam.

ASEAN secara dramatis dapat melampaui negara-negara lain di dunia dalam hal pertumbuhan PDB per kapita sejak akhir 1970-an. Pertumbuhan pendapatan menguat sejak tahun 2000, dengan rata-rata keuntungan riil tahunan lebih dari 5 persen. Potensi pendapatan per kapita di ASEAN dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga yang menjadi bagian dari “*consuming class*”. Sudah sekitar 67 rumah tangga di negara-negara ASEAN menjadi bagian dari “*consuming class*” dengan pendapatan melebihi rata-rata seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Angka tersebut dapat mencapai hampir dua kali lipat menjadi 125 juta rumah tangga pada tahun 2025. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai pasar konsumen penting di masa depan (HV et. al., 2014).



¹ Association of Southeast Asian Nations; excludes Brunei.

² Purchasing power parity adjusts for price differences in identical goods across countries to reflect differences in purchasing power in each country.

³ Forecast; figures may not sum, because of rounding.

Source: McKinsey Global Institute Cityscope database; McKinsey Global Institute analysis

Sumber: McKinsey&Company, 2014

Gambar 1. Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Konsumen di ASEAN pada Tahun 2025

Asian Development Bank (ADB) melakukan kajian tentang kecenderungan negara di Asia Tenggara memobilisasi sumber daya domestiknya. Kajian tersebut menyoroti kebijakan perpajakan yang muncul serta langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan administrasi perpajakan di negara ASEAN. Isu yang ada antara lain adalah (i) perpajakan untuk masyarakat yang sudah lanjut usia; (ii) penguatan mobilisasi pendapatan atas urbanisasi yang



cepat; (iii) masalah perpajakan yang muncul dari pergeseran sektoral; (iv) kebijakan perpajakan untuk meningkatkan daya saing; dan (v) transformasi digital otoritas perpajakan. Terkait dengan isu keempat, arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Asia Tenggara dianggap sebagai katalis daya saing dan industrialisasi. FDI di negara ASEAN tumbuh sekitar 3% pada tahun 2018 dan meningkat tiga tahun berturut-turut. Singapura menjadi negara yang terus menarik sebagian besar arus masuk FDI. Thailand juga mencatat peningkatan terbesar dalam arus masuk FDI pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 62%. Perekonomian Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand, memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan kemampuan untuk mengakomodasi pergeseran produksi dalam skala besar. FDI diperkirakan akan terus menguat karena negara-negara Asia Tenggara terus mengadopsi langkah-langkah yang ditujukan untuk menarik investasi (Chongvilaivan & Chooi, 2021).

Isu lain yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah liberalisasi perdagangan. Banyak negara yang masih sangat bergantung pada pajak perdagangan sebagai sumber pendapatan pemerintahnya (Baunsgaard & Keen, 2010). Langkah pertama reformasi kebijakan perpajakan, yang sering kali melibatkan pengurangan tarif, dapat mengarah pada peningkatan penerimaan pajak perdagangan (Ebrill et al., 1999). Tetapi akan ada titik dimana pergerakan lebih lanjut menuju perdagangan yang lebih bebas mengurangi penerimaan pajak perdagangan. Pertanyaannya kemudian apakah kerugian penerimaan pajak tersebut dapat diperoleh kembali dari sistem pajak dalam negeri sambil mempertahankan keuntungan dari reformasi perdagangan itu sendiri. Secara teori, mudah untuk melakukannya yaitu dengan memperkuat pajak tidak langsung dalam negeri seperti penelitian oleh Keen & Ligthart (2001) yang menunjukkan bahwa dalam ukuran perekonomian yang kecil, strategi menaikkan pajak konsumsi domestik dengan pemotongan tarif akan menarik konsumen karena harga yang turun, sehingga dapat menjaga keuntungan efisiensi produksi dari reformasi tarif, dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah karena basis pajak dari konsumsi lebih luas daripada impor.

ASEAN telah menjadikan perluasan perdagangan sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat sejak tahun 1980-an. Liberalisasi perdagangan di ASEAN ini berhubungan erat dengan arus masuk FDI. Hasilnya negara-negara anggota ASEAN yang maju (khususnya Singapura, Malaysia, Thailand, diikuti Filipina dan Indonesia) telah berhasil berintegrasi dengan jaringan produksi dan rantai pasokan Asia Timur, sehingga memperluas perdagangan intra-regional dan intra-industri secara signifikan. ASEAN juga telah membuat kemajuan dalam integrasi ekonomi baik internal maupun eksternal dengan mitranya di seluruh Asia bahkan dunia. Pada 1993, ASEAN meluncurkan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang meliberalisasi perdagangan barang dan jasa serta aliran FDI. ASEAN juga membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 (Kawai & Naknoi, 2015). Adanya *Free Trade Area* (FTA) ini berimplikasi pada penerimaan pajak, seperti dalam Kajian Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2015) di Indonesia. Penerapan FTA mempengaruhi volume perdagangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi basis pajak untuk pajak penghasilan.

Melihat besarnya efek dari keterbukaan perdagangan, hampir semua model teori perdagangan memprediksi keuntungan dari perdagangan dalam bentuk PDB riil per kapita yang lebih tinggi, khususnya dalam jangka panjang (Felbermayr & Groeschl, 2011). Penelitian Freund dan Bolaky (2008) dengan menggunakan data lintas negara dari 126 negara menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berdampak positif terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini mengungkapkan bahwa perdagangan mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi dalam perekonomian yang fleksibel. Selain mempengaruhi pendapatan per kapita, menurut Chakrabarti (2001) keterbukaan perdagangan juga menunjukkan betapa mudahnya investor dapat memindahkan modal masuk dan keluar dari suatu negara, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa keterbukaan perdagangan merupakan penentu penting arus masuk FDI. Chakrabarti



(2001) meneliti determinan FDI di 135 negara dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan suatu negara memiliki dampak positif yang signifikan terhadap arus masuk FDI. Demikian pula, Campos & Kinoshita (2003) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan yang lebih besar berkontribusi pada lebih banyak arus masuk FDI di *emerging market economy*. Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan dapat memoderasi hubungan antara pendapatan per kapita serta FDI terhadap penerimaan pajak.

Beberapa penelitian sudah banyak dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di tingkat regional seperti di negara-negara Sub-Sahara Afrika (Bothole, 2010), Amerika Latin dan Karibia (Dioda, 2012), negara-negara Timur Tengah (Imam & Jacobs, 2014), dan Uni Eropa (Kalaš et al., 2018). Bahkan penelitian untuk negara-negara Asia Tenggara telah dilakukan oleh Saptono & Mahmud (2021) melihat kinerja pajak ASEAN yang relatif lemah. Syadullah (2015) dan Anh & Thinh (2018) juga melakukan penelitian dalam konteks Asia Tenggara, dengan masing-masing menyelidiki dampak faktor kelembagaan dan sosial ekonomi terhadap penerimaan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini mencoba menguji pengaruh pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak. Dilanjutkan dengan pengujian moderasi keterbukaan perdagangan pada pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan Pajak

Banyak ekonom percaya bahwa penerimaan pajak adalah salah satu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan suatu negara. Peran pajak dalam pertumbuhan ekonomi telah diakui dalam teori-teori belakangan ini. Teori neoklasik juga percaya bahwa penerimaan pajak lebih penting daripada tarif pajak karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan menghasilkan penerimaan pajak tambahan yang cukup untuk membuatnya berkelanjutan (Nguyen & Darsono, 2022). Penerimaan pajak menurut *World Bank* (2023) adalah persentase dari PDB yang mengacu pada transfer wajib ke pemerintah pusat untuk kepentingan publik. Transfer wajib tertentu seperti denda, penalti, dan sebagian besar kontribusi jaminan sosial tidak termasuk dalam perhitungan *tax revenue*. Pengembalian dana dan koreksi dari pendapatan pajak yang dikumpulkan secara keliru diperlakukan sebagai pendapatan negatif.

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita digunakan untuk menentukan rata-rata pendapatan per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya (Kenton, 2022). Sedangkan menurut *World Bank* (2023) PDB per kapita adalah jumlah nilai tambah bruto dari semua produsen dalam perekonomian ditambah pajak produk (dikurangi subsidi) yang tidak termasuk dalam penilaian output, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDB per kapita memberikan ukuran dasar dari nilai output per orang, yang merupakan indikator tidak langsung dari pendapatan per kapita.

Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment merupakan investasi jangka panjang dengan cara menanamkan modal pada suatu perusahaan yang berlokasi di satu negara, yang juga merupakan bentuk dari sistem ekonomi global (Manurung et al., 2018). FDI juga dapat didefinisikan



sebagai suatu proses dimana warga satu negara asal (*home country*) memperoleh kepemilikan sumber daya untuk mengontrol manufaktur, distribusi, dan operasi lain dari sebuah perusahaan di negara tuan rumah (*host country*) (Moosa, 2002).

Dari definisi yang diberikan, terlihat bahwa FDI dapat dibagi menjadi beberapa komponen penting. Pertama, FDI melibatkan perusahaan atau individu dari *home country* yang memiliki niat untuk memperluas bisnis mereka di luar negeri untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Keuntungan dapat diperoleh dari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya produksi yang lebih rendah dan ukuran pasar yang lebih besar. Dalam hal ini, globalisasi membantu investor untuk mendapatkan keuntungan dari luar negeri yang memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi. Komponen kedua FDI adalah *host country*. *Host country* adalah tempat atau negara dimana investor asing akan menaruh uang mereka dan memulai bisnis mereka. Komponen ketiga adalah investasi itu sendiri. Investasi dari investor asing tidak hanya dalam bentuk uang atau aliran modal tetapi juga dalam bentuk *transferable technology, knowledge, dan management skills*. Komponen terakhir dari FDI adalah kemampuan perusahaan induk atau investor untuk mengendalikan anak perusahaannya di *host country*. Porsi kepemilikan merupakan salah satu proksi kemampuan pengendalian dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Tidak ada batasan standar kepemilikan saham, tetapi umumnya bagian terendah dari perusahaan induk ke anak perusahaannya adalah 10 persen (UNCTAD, 2007).

Bagaimana FDI Mempengaruhi Perpajakan?

FDI merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak. FDI dapat mempengaruhi penerimaan pajak baik secara positif atau negatif. FDI dapat secara langsung berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak apabila adanya FDI diikuti dengan pendirian perusahaan multinasional baru. Perusahaan multinasional yang baru ini nantinya akan didaftarkan sebagai wajib pajak baru. Dalam pengertian ini berarti semakin banyak pembayar pajak, semakin banyak juga potensi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Selain pendirian perusahaan multinasional baru, pengaruh langsung FDI terhadap penerimaan pajak juga dapat disebabkan oleh transfer teknologi, pengetahuan, dan keterampilan manajerial sebagai efek *spillover* dari perusahaan induk di negara asal ke perusahaan multinasional sebagai anak perusahaannya. Perusahaan induk mentransfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan manajerial melalui pelatihan yang diberikan kepada anak perusahaannya untuk mempelajari sistem multinasional seperti pengendalian kualitas, inventaris, dan akuntansi biaya (Blalock dan Gertler, 2005). Akibatnya, penerimaan pajak mungkin meningkat karena peningkatan profitabilitas perusahaan multinasional (MacDougall, 1960).

Pengaruh positif dan tidak langsung FDI terhadap penerimaan pajak terjadi jika penerimaan pajak meningkat karena skala ekonomi yang lebih besar yang disebabkan oleh efek *spillover* secara horizontal. Pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak bergantung pada persaingan dan teknologi *spillover* yang dibawa oleh perusahaan multinasional dan merangsang produktivitas (Nguyen et al., 2014). *Spillover* produktivitas dapat terjadi ketika *output* meningkat karena transfer teknologi dari perusahaan multinasional ke perusahaan domestik. Persaingan antar perusahaan juga mendorong perusahaan dalam negeri untuk mengadopsi teknologi atau pengetahuan demi meningkatkan produktivitas dan efisiensinya (Demena & Bergeijk, 2019). Perusahaan dalam negeri mengamati dan meniru pengetahuan atau teknologi yang digunakan oleh perusahaan asing untuk meningkatkan produktivitasnya. Perpindahan tenaga kerja terlatih dari perusahaan multinasional ke perusahaan domestik juga dapat mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan domestik. Selain itu, kehadiran FDI dapat memicu peningkatan jumlah perusahaan milik dalam negeri untuk mendukung operasi perusahaan multinasional. Dengan kata lain, setiap penambahan FDI dapat merangsang efek “*crowding-in*” bagi negara (Borensztein et al., 1998). Bertambahnya jumlah perusahaan berarti



bertambah pula jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah perusahaan dalam negeri akan diikuti dengan kenaikan permintaan tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa FDI juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran (Zeb et al., 2014). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah perusahaan, dan peningkatan lapangan kerja akan meningkatkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

FDI dapat meningkatkan perdagangan internasional dari hubungan *customer-supplier* antarnegara karena adanya peningkatan impor barang setengah jadi dari negara asal dan peningkatan ekspor produk barang akhir dari *host country* (Safitriani, 2014). Dengan demikian, penerimaan pajak yang terkait dengan perdagangan internasional juga dapat meningkat.

Selain itu, FDI cenderung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan secara positif, peningkatan FDI dapat memicu peningkatan permintaan agregat yang dapat mendorong pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak (Mahmood & Chaudhary, 2013), misalnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak properti, dan jenis pajak tidak langsung lainnya.

Di sisi lain, FDI juga dapat menggerus penerimaan pajak secara langsung. Penurunan tarif pajak untuk menarik FDI menjadi salah satu alasan mengapa FDI dapat menurunkan penerimaan pajak (MacDougall, 1960; Nguyen et al., 2014). Selain itu, FDI dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak secara langsung jika ada motif “*transfer pricing*” dari perusahaan multinasional (Gropp & Kostial, 2000). Globalisasi dan perbedaan tarif yang signifikan antarnegara menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan *profit shifting*. Akibatnya, *host country* mungkin tidak mendapat keuntungan penerimaan pajak yang optimal dari FDI jika keuntungan dari perusahaan multinasional dialihkan ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau *tax heaven countries*.

FDI juga mungkin membawa efek negatif secara tidak langsung pada penerimaan pajak. Persaingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik dapat mengecilkan kontribusi perusahaan domestik terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan perusahaan domestik umumnya mengalami permasalahan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan manajerial sehingga perusahaan domestik cenderung kurang produktif dibandingkan perusahaan multinasional. Lebih jauh lagi, penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) membatasi perusahaan domestik untuk mengejar ketertinggalan dari kemajuan teknologi yang dicapai oleh perusahaan multinasional. Akibatnya, FDI berpotensi menimbulkan efek “*crowding-out*” bagi perusahaan domestik. Efek *crowding-out* juga mungkin terjadi jika perusahaan multinasional dengan mudah merekrut karyawan berbakat dari perusahaan domestik. Gaji lebih tinggi yang diberikan oleh perusahaan multinasional dapat merangsang karyawan berbakat untuk pindah ke perusahaan multinasional dan mencegah perusahaan domestik mempekerjakan karyawan berbakat (Long, 2005). Kondisi ini diperparah jika terjadi monopoli industri dari perusahaan multinasional yang menghindari perusahaan domestik untuk bersaing. Akibatnya, kontribusi penerimaan pajak dari domestik akan menurun akibat persaingan yang tidak merata (Nguyen et al., 2014).

Keterbukaan Perdagangan

Keterbukaan perdagangan adalah jumlah impor dan ekspor yang dibandingkan oleh PDB. Alotaibi & Mishra (2014) menyatakan bahwa investasi ekuitas bilateral berkorelasi kuat dengan pola dasar perdagangan. Investor lebih mampu memperoleh informasi akuntansi dan peraturan di pasar luar negeri melalui perdagangan dan dengan demikian berinvestasi dalam aset asing. Transaksi perdagangan dapat secara langsung menghasilkan arus keuangan lintas batas termasuk kredit perdagangan, asuransi ekspor, fasilitasi pembayaran. Data Keterbukaan Perdagangan berasal dari Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia.



Hipotesis

Dalam Hung & Tien (2022), penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: ekonomi, struktur, kelembagaan, dan masyarakat. Faktor-faktor ini dijelaskan melalui variabel utama antara lain sebagai berikut:

- Tingkat pembangunan ekonomi (PDB): Faktor ini biasanya diukur dengan PDB per kapita. Semakin tinggi PDB per kapita, semakin tinggi permintaan barang dan jasa secara umum. Selain itu, PDB per kapita yang tinggi meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian jumlah pajak yang dipungut akan bertambah (Hung & Tien, 2022).
- FDI: Variabel ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena negara dapat menciptakan insentif pajak untuk menarik aliran investasi asing (Cassou, 1997). Menurut Gugler & Brunner (2007), faktor ini juga dapat memberikan pengaruh positif karena arus masuk FDI meningkatkan daya saing negara dan meningkatkan basis pajak.
- Keterbukaan perdagangan: Faktor ini tercermin dalam nilai total impor dan ekspor yang dibandingkan dengan PDB. Di negara maju, pajak atas perdagangan internasional juga merupakan sumber penerimaan yang penting dan berdampak positif terhadap penerimaan pajak karena ketika kegiatan perdagangan diperluas, daya saing ekonomi meningkat, sehingga lebih banyak pajak yang dapat dipungut (Baunsgaard & Keen, 2010).

Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
H2: *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
H3: Keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
H4: Keterbukaan perdagangan dapat memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak.
H5: Keterbukaan perdagangan dapat memperkuat hubungan antara *Foreign Direct Investment* dan penerimaan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank* dengan bentuk data panel, yaitu perpaduan dari data *time-series* mencakup periode 2008-2018 dan data *cross-section* dengan ruang lingkup penelitian negara ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Variabel yang dipilih pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya seperti yang dijelaskan pada bagian landasan teori. Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pajak (*tax revenue*) sebagai persentase dari PDB, dengan variabel independen (X) yaitu pendapatan per kapita dan FDI, variabel moderasi (Z) yaitu keterbukaan perdagangan, serta variabel kontrol yaitu urbanisasi. Definisi operasional dari seluruh variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	Notasi	Definisi (Satuan Ukuran)
Penerimaan Pajak	<i>TR</i>	Total penerimaan pajak (<i>tax revenue</i>) per PDB (% dari PDB)
Pendapatan Per Kapita	<i>LnPCI</i>	Logaritma natural PDB per kapita (<i>current US\$</i>)
<i>Foreign Direct Investment</i>	<i>FDI</i>	Aliran masuk bersih (% dari PDB)
Keterbukaan Perdagangan	<i>OPEN</i>	Total ekspor dan impor (% dari PDB)



Urbanisasi *URB* Penduduk perkotaan (% dari total populasi)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi data panel dengan bantuan *tools* STATA 17. Menurut Verbeek (2000), ada tiga jenis metode dalam data panel yaitu pendekatan *pooled least square* (PLS), pendekatan *fixed effect method* (FEM), dan pendekatan *random effect method* (REM). Uji pemilihan model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang menjelaskan hubungan antar variabel. Uji pemilihan model panel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Pemilihan Model Data Panel

Uji Model Data Panel	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Uji Breusch and Pagan		
Lagrangian Multiplier (LM BP)	PLS lebih baik daripada REM	REM lebih baik daripada PLS
Uji Chow	PLS lebih baik daripada FEM	FEM lebih baik daripada PLS
Uji Hausman	REM lebih baik daripada FEM	FEM lebih baik daripada REM

Setelah terpilih model yang terbaik, dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dan memprediksi nilai variabel dependen dari nilai yang diketahui dari variabel independen (Gujarati, 2004). Uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Normalitas	Data berdistribusi normal	Data tidak berdistribusi normal
Heteroskedastisitas	Varian data Homoskedastis	Varian data Heteroskedastis
Autokorelasi	Model Non-Autokorelasi	Model Autokorelasi

Setelah model yang terbaik dipilih dan memenuhi asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah menguji kebaikan model atau *Goodness of Fit* (Walpole, 2012). *Goodness of Fit test* terdiri dari:

1. Uji F

Pengujian hipotesis F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel tak bebas.

2. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 ini digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. R^2 mempunyai nilai antara 0 dan 1, semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi atau semakin mendekati nilai 1, maka akan semakin baik regresinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum ke hasil pengujian, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing variabel dalam penelitian selama periode penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Deskriptif

Deskriptif	<i>TR</i>	<i>PCI</i>	<i>FDI</i>	<i>OPEN</i>	<i>URB</i>
<i>Mean</i>	13.33938	15080.45	5.738047	149.0061	63.34938
<i>Std. dev.</i>	1.712223	20005.49	7.470764	112.4448	21.0852
<i>Min</i>	9.877293	1904.196	0.0566923	37.42134	41.242
<i>Max</i>	17.01253	66859.34	28.90799	437.3267	100



Sumber: STATA 17, diolah

Tabel 4 menyajikan ringkasan statistik penerimaan pajak dan variabel pembentuknya. Ringkasan statistik tersebut berisi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel. Selama periode penelitian (2008-2018), nilai rata-rata penerimaan pajak ASEAN-5 adalah sekitar 13,3% dari PDB. Nilai minimum dari penerimaan pajak adalah sekitar 9,9% yang diperoleh di Indonesia pada tahun 2017. Nilai maksimum tercatat pada 2013 di Thailand dengan persentase sekitar 17% dari PDB. Untuk variabel lain nilai rata-ratanya adalah US\$ 15.080,45 untuk pendapatan per kapita, 5,74% untuk FDI, 149,01% untuk keterbukaan perdagangan, dan 63,35% untuk urbanisasi.

Persyaratan dalam model regresi adalah tidak adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang dilihat dari nilai *Variant Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Pada Tabel 5, semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF lebih dari 10. Ini berarti semua terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Namun karena penelitian ini menggunakan data panel, masalah multikolinearitas dapat diabaikan mengingat penggabungan data *cross section* dan *time series* merupakan salah satu *rule of thumb* (Gujarati, 2004).

Tabel 5. Uji Multikolinearitas Variabel Independen

Variabel	VIF
<i>LnPCI</i>	31.82
<i>FDI</i>	112.95
<i>OPEN</i>	629.59
<i>LnPCI*OPEN</i>	855.68
<i>FDI*OPEN</i>	162.58
<i>URB</i>	14.49

Sumber: STATA 17, diolah

Selanjutnya, pemilihan model data panel dilakukan menggunakan uji yang telah disebutkan di bagian metode penelitian. Hasil uji ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Model Data Panel

Uji	Prob. Nilai	Kesimpulan
LM BP	1.0000	PLS lebih baik daripada REM
Chow	0.1067	PLS lebih baik daripada FEM
Hausman	0.8754	REM lebih baik daripada FEM

Sumber: STATA 17, diolah

Berdasarkan hasil pengujian model data panel di atas, model yang dipilih dalam penelitian ini adalah PLS. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik agar model yang dipilih dapat digunakan untuk melihat efek prediksi. Uji asumsi yang digunakan adalah asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Asumsi Klasik

Uji	Prob. Nilai	Kesimpulan
Normalitas	0.5891	Data berdistribusi normal
Heteroskedastisitas	0.5538	Varian data Homoskedastis
Autokorelasi	0.1459	Model Non-Autokorelasi

Sumber: STATA 17, diolah

Melihat hasil pada Tabel 7, semua asumsi baik normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi telah terpenuhi karena nilai probabilitas setiap uji lebih besar dari 0,05. Setelah lolos uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan *Goodness of Fit test* yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8.



Tabel 8. *Goodness of Fit test*

Variabel	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob.
_cons	-4.412341	3.652973	-1.21	0.233
<i>LnPCI</i>	2.191777	0.5518418	3.97	0.000
<i>FDI</i>	0.1567545	0.1524566	1.03	0.309
<i>OPEN</i>	0.1623401	0.0239148	6.79	0.000
<i>LnPCI*OPEN</i>	-0.0146198	0.0024369	-6.00	0.000
<i>FDI*OPEN</i>	-0.0002887	0.0004943	-0.58	0.562
<i>URB</i>	-0.0841144	0.0193456	-4.35	0.000
<i>R-squared</i>	0.8119	<i>Adjusted R-squared</i>		0.7884
<i>F-statistic</i>	34.54	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.0000

Sumber: STATA 17, diolah

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,7884 yang berarti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan penerimaan pajak sebesar 78,84 persen. Sisanya sebesar 21,16 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Kemudian, uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil ini diidentifikasi oleh nilai probabilitas statistik $F=0,0000$ yang lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Hasil ini juga menunjukkan bahwa permodelan yang dilakukan telah sesuai. Untuk uji parsial, signifikansi suatu variabel diidentifikasi berdasarkan nilai probabilitas uji t. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil di atas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut.

$$TR_{it} = -4.4123 + 2.1918LnPCI_{it} + 0.1568FDI_{it} + 0.1623OPEN_{it} - 0.0146LnPCI * OPEN_{it} - 0.0003FDI * OPEN_{it} - 0.0841URB_{it}$$

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 2,191777 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Hasil tersebut diinterpretasikan sebagai peningkatan 1 persen pendapatan per kapita meningkatkan persentase penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 2,19 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di banyak negara dimana pembangunan ekonomi membantu meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan efisiensi otoritas pajak dalam pemungutan pajak (Chelliah, 1971; Gupta, 2007; Karagoz, 2013; Aneyew, 2016).

Hal ini karena seiring berkembangnya suatu negara, basis pajak akan semakin luas dan semakin besar daripada pertumbuhan pendapatan. Pendapatan per kapita yang lebih tinggi mencerminkan tingkat pembangunan yang lebih tinggi, dan menyiratkan kapasitas yang lebih tinggi untuk membayar pajak serta kapasitas yang lebih besar untuk memungut pajak (Chelliah, 1971).

Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.1567545 dan nilai probabilitas sebesar 0,1545. Hal ini menunjukkan bahwa FDI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Gugler dan Brunner (2007), FDI tidak memiliki signifikansi statistik mungkin karena negara-negara di kawasan ASEAN-5 memiliki banyak kebijakan tentang pembebasan pajak, pengurangan pajak, dan insentif pajak untuk menarik FDI (Hung & Tien, 2022).



Di ASEAN sendiri, insentif pajak termasuk yang banyak digunakan untuk menarik investasi. Berbagai insentif pajak diterapkan di negara-negara anggota ASEAN ditunjukkan pada Gambar 2. Dalam konteks ini organisasi internasional juga telah merekomendasikan rasionalisasi dan reformasi insentif pajak. *International Monetary Fund* (IMF) (2021) baru-baru ini merekomendasikan negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan pascapandemi dengan merasionalisasi insentif pajak berbasis *profit* untuk FDI dan insentif khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM) (Andriyansyah et. al., 2021).

Table 1. Tax incentive instruments in ASEAN countries

	Income Tax Exemption	Tax Rate Reduction	Tax Allowance	Tax Credit	Trade Tax Exemption
Brunei	√		√		√
Cambodia	√		√		√
Indonesia	√	√	√		√
Lao PDR	√	√	√		√
Malaysia	√	√	√		√
Myanmar	√	√	√		√
Philippines	√	√	√	√	√
Singapore	√	√	√		√
Thailand	√		√		√
Vietnam	√	√	√	√	√

Sources: Deloitte, 2020; KPMG, 2015; National Authorities responsible for Investment Incentives (See References); AMRO staff compilation.
Note: The term "tax holidays" is loosely defined and often used to refer to general tax incentives, including tax exemption and tax rate reduction, for a certain period. Sometimes, it is narrowly defined to refer to income tax exemption in some literature. To avoid confusion, the term "tax holiday" is not used in this paper.

Sumber: Asean+3 Macroeconomics Research Office, 2021

Gambar 2. Instrumen Insentif Pajak di Negara ASEAN

Dari sisi biaya, insentif pajak memang mengurangi jumlah penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut. Insentif pajak juga mengakibatkan kerugian langsung dalam penerimaan pajak bagi pemerintah *host country* dalam bentuk hilangnya penerimaan. Namun dalam kasus di ASEAN-5, menarik FDI dengan memberikan insentif pajak dianggap sebagai *zero-sum game*. Karena pada akhirnya muncul persaingan pajak antarnegara yang mengurangi efek yang diinginkan dari insentif pajak untuk menarik FDI (Andriyansyah et. al., 2021).

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.1623401 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Hasil ini sejalan dengan penelitian Piancastelli (2001), Gupta (2007), Profeta & Scabrosetti (2010), dan Dioda (2012) bahwa kegiatan perdagangan internasional negara-negara di kawasan ini mendatangkan keuntungan besar melalui ekspor barang. Keterbukaan perdagangan mengurangi hambatan, mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan impor dan ekspor, sehingga meningkatkan produksi dan menciptakan lebih banyak penerimaan untuk pajak.

Untuk melihat ekspor di ASEAN-5, Astrini & Az zakiyyah (2018) meneliti pemetaan produk untuk ASEAN-5 tahun 2016 yang menghasilkan sepuluh produk terbaik dalam keunggulan komparatif dan neraca perdagangan positif (net eksportir). Dari masing-masing negara ASEAN-5 memiliki komoditas ekspor dan keunggulan komparatif sebagai berikut: Indonesia sebagian besar berasal dari lemak dan minyak hewani atau nabati, Malaysia sebagian besar dari karet, Singapura dan Thailand sebagian besar dari bahan kimia organik, dan Filipina sebagian besar dari peralatan listrik dan listrik. Semakin tinggi keunggulan komparatif suatu produk tertentu, semakin tinggi kemungkinan suatu negara sebagai net eksportir (Widodo, 2009).

Keterbukaan Perdagangan Memoderasi Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak



Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berhasil memoderasi pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak. Namun hasil regresi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis ditunjukkan dari koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar 0.0146198. Hal ini berarti keterbukaan perdagangan justru memperlemah hubungan antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak. Keterbukaan perdagangan yang berlebihan dapat mengurangi peran penerimaan pajak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ho et. al., 2023). Emran & Stiglitz (2005) menemukan bahwa liberalisasi dapat mengurangi pajak perdagangan luar negeri, jika tidak diimbangi dengan pajak konsumsi maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula Keen & Lighthart (2005) berpendapat bahwa penerapan liberalisasi perdagangan akan mengurangi kesejahteraan. Hal ini karena pengurangan pajak impor membuat adanya peningkatan pajak konsumsi yang bergeser dari perusahaan domestik ke perusahaan asing. Dampak negatif terhadap keuntungan domestik ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan yang dapat diprosikan oleh pendapatan per kapita.

Keterbukaan Perdagangan Memoderasi Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak memoderasi pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi nilai probabilitas sebesar 0,281 yang berarti pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap hubungan antara FDI dan penerimaan pajak adalah tidak signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena para investor belum melihat liberalisasi perdagangan di ASEAN-5 sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan lokasi investasi. Hasil ini didukung oleh penelitian Wickramarachchi (2019) di Sri Lanka, dimana perusahaan manufaktur multinasional yang berorientasi ekspor diberikan konsesi untuk impor bahan baku dan mesin setidaknya pada tahap awal. Jadi, kebijakan perdagangan dalam negeri secara keseluruhan mungkin tidak menjadi perhatian investor asing.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan pajak di ASEAN-5 tahun 2008-2018 menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan per kapita yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pada penelitian ini variabel FDI tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Selain itu, keterbukaan perdagangan hanya dapat memoderasi hubungan antara pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak, dan keterbukaan perdagangan tidak dapat memoderasi hubungan antara FDI dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan dapat memperlemah hubungan positif pendapatan per kapita dengan penerimaan pajak karena liberalisasi dapat mengurangi pajak perdagangan luar negeri, yang jika tidak diimbangi dengan pajak konsumsi dalam negeri akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tepat oleh setiap negara di ASEAN-5 agar keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak.

Keterbatasan penelitian ini menjadikan hasil penelitian ini hanya berlaku untuk 5 negara ASEAN. Untuk penelitian lebih lanjut dimungkinkan bagi peneliti selanjutnya menambahkan populasi seluruh negara di kawasan ASEAN. Diharapkan penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel-variabel lain untuk mengetahui determinan dari penerimaan pajak sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih kompleks dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA



- Alotaibi, Abdullah R. & Mishra, Anil V. (2014). *Chapter 31 - Determinants of International Financial Integration of GCC Markets*. Emerging Markets and the Global Economy, Academic Press, 2014, Pages 749-771.
- Andriyansyah, Hong, S. H. & Nam, B. (2021). *Policy Considerations in Using Tax Incentives for Foreign Investment*. Policy Perspectives Paper (PP/21-01).
- Aneyew, D. (2016). *Determinants of tax revenue in Ethiopia Johansen co-intergration approach's*. International Journal of Bussiness, Vol. 3, No. 6, pp.69–84.
- Anh, L. H. & Think, T. Q. (2018). *Factors impacting tax revenue of Southeast Asian Countries*. Studies in Computational Intelligence, 760, 514–530. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73150-6_41.
- Astrini, E. W. & Az zakiyyah, N. A. (2018). *Comparative Advantage Measurement in ASEAN's Ten Leading Export Commodities: A Case Study of ASEAN-5*. BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi Vol. 4 No. 1.
- Baunsgaard, T. & Keen, M. (2010). *Tax revenue and (or?) trade liberalisation*. Journal of Public Economics, Vol. 94, Nos. 9–10, pp.563–577.
- Blalock, G. & P.J. Gertler. (2005). *Foreign Direct Investment and Externalities: The Case for Public Intervention*. Does foreign direct investment promote development: 73-106.
- Borensztein, E., J. De Gregorio & J. Lee. (1998). *How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?*. Journal of International Economics 45(1): 115-135.
- Bothhole, T. D. (2010). *Tax Effort and the Determinants of Tax Ratio in Sub-Saharan Africa*. International Conference on Applied Economics, 101–113.
- Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2003). *Why does FDI go where it goes? New evidence from the transition economies (November 2003)*. IMF Working Paper No. 03/228.
- Cassou, S. P. (1997). *The link between tax rates and foreign direct investment*. Applied Economics, Vol. 29, No. 10, pp.1295–1301.
- Chakrabarti, A. (2001). *The determinants of foreign direct investments: Sensitivity analyses of cross-country regressions*. Kyklos, 54(1), 89-114. <https://doi.org/10.1111/1467-6435.00142>.
- Chelliah, R.J. (1971). *Trends in taxation in developing countries*. IMF Staff Papers, 18(2): 254-325.
- Chongvilaivan, Aekapol & Chooi, Annette. (2021). *A Comprehensive Assessment of Tax Capacity in Southeast Asia*. Asian Development Bank.
- Dioda, L. (2012). *Structural Determinants of Tax Revenue in Latin America and the Caribbean, 1990-2009*. ECLAC (December). <http://hdl.handle.net/11362/26103>.
- Demena, B.A. & Bergeijk, P.A. (2019). *Observing FDI spillover transmission channels: evidence from firms in Uganda*. Third World Quarterly, pp.1-22.
- Ebrill, L., J. Stotsky, & R. Gropp. (1999). *Revenue Implications of Trade Liberalization*. IMF Occasional Paper No.180 (Washington: International Monetary Fund).
- Emran, M. S., & Stiglitz, J. E. (2005). *On selective indirect tax reform in developing countries*. Journal of Public Economics, 89(4), 599–623. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.04.007>.
- Felbermayr, Gabriel & Groeschl, Jasmin. (2011). *Natural Disasters and the Effect of Trade on Income: A New Panel IV Approach*. European Economic Review. 58. 10.1016/j.eurocorev.2012.11.008.
- Freund, C. & Bolaky, B. (2008). *Trade, regulations, and income*. Journal of Development Economics, 87, p. 309-321.
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). *Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point?* IMF Working Papers 16/234. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Is-sues/2016/12/31>.



- Gropp, M. R. & M.K. Kostial. (2000). *The Disappearing Tax Base: Is Foreign Direct Investment (FDI) Eroding Corporate Income Taxes?* International Monetary Fund.
- Gugler, P. & Brunner, S. (2007). *FDI effects on national competitiveness: a cluster approach*. International Advances in Economic Research, Vol. 13, No. 3, pp.268–284.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics By Gujarati* (pp. 1–1002). McGraw-Hill Inc.
- Gupta, A.S. (2007). *Determinants of tax revenue efforts in developing countries*. International Monetary Fund Working Paper No. 184.
- Han, Fei & Ng, Thiam Hee. (2011). *ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model*. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration (Issue 76).
- Ho, T. T., Tran, X. H. & Nguyen, Q. K. (2023). *Tax revenue-economic growth relationship and the role of trade openness in developing countries*. Cogent Business & Management, 10:2, DOI: 10.1080/23311975.2023.2213959.
- Hung, Tran & Tien, Nguyen. (2022). *Factors impacting state tax revenue in ASEAN countries*. International Journal of Public Sector Performance Management.
- HV, V., Thompson, F., & Tonby, O. (2014). *Understanding ASEAN: Seven things you need to know*. McKinsey & Company.
- Imam, P. A. & Jacobs, D. (2014). *Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East*. Review of Middle East Economics and Finance, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.1515/rmeef-2014-0001>.
- International Monetary Fund (IMF). (2021). *Fiscal Monitor, April 2021: A Fair Shot*. <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021>.
- Junquera-Varela, R.-F. & Haven, B. (2018). *Getting to 15 Percent: Addressing the Largest Tax Gaps*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/governance/getting-15-percent-addressing-largest-tax-gaps>.
- Kalaš, B., Mirović, V. & Milenković, N. (2018). *The relationship between taxes and economic growth: Evidence from Serbia and Croatia*. The European Journal of Applied Economics, 15(2), 17–28. <https://doi.org/10.5937/ejae15-18056>.
- Karagöz, K. (2013). *Determinants of tax revenue: Does sectorial composition matter?* Journal of Finance, Accounting and Management, 4(2): 50-63.
- Kawai, Masahiro & Naknoi, Kanda. (2015). *ASEAN Economic Integration through Trade and Foreign Direct Investment: Long-Term Challenges*. ADBI Working Papers 545, Asian Development Bank Institute.
- Keen, M. & Ligthart, J. (2001). *Coordinating Tariff Reductions and Domestic Tax Reform*. Journal of International Economics, Vol. 56, pp. 407–425.
- Keen, M., & Ligthart, J. E. (2005). *Coordinating tariff reduction and domestic tax reform under imperfect competition*. Review of International Economics, 13(2), 385–390. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2005.00510.x>.
- Long, G. (2005). *China's Policies on FDI: Review and Evaluation*. Does foreign direct investment promote development:315-336.
- MacDougall, G.D.A. (1960). *The Benefits and Costs of Private Investment from Abroad: A Theoretical Approach I*. Bulletin of the Oxford University Institute of Economics & Statistics 22(3): 189-211.
- Mahmood, H. & A. Chaudhary. (2013). *Impact of FDI on Tax Revenue in Pakistan*. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences 7(1): 59.
- Manurung, R., et al. (2018). *Analisis Pengaruh Ekspor, Investasi Asing Langsung Dan Investasi Portofolio Terhadap Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia Tahun 2006-2017*. Jom Feb, 1(1), 1. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/viewFile/20817/20142>.
- Moosa, I. (2002). *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. Palgrave Macmillan.



- Nguyen, H.T.T., M.H. Nguyen & A. Goenka. (2014). *How does FDI Affect Corporate Tax Revenue of the Host Country*. Document De Recherche Epee, Centre D'etudes Des Politiques Economiques De L'universite D'evry.
- Nguyen, Hoa & Darsono, Susilo. (2022). *The Impacts of Tax Revenue and Investment on the Economic Growth in Southeast Asian Countries*. Journal of Accounting and Investment. 23. 128-146. 10.18196/jai.v23i1.13270.
- Piancastelli, M. (2001). *Measuring the Tax Effort of Developed and Developing Countries: Cross Country Panel Data Analysis - 1985/95*. IPEA Working Paper No. 818. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.283758>.
- Profeta, P. & Scabrosetti, S. (2010). *The Political Economy of Taxation: Lessons for Developing Countries*, Edward Elgar Publishing Limited, Italy.
- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2015). *Dampak Penerapan Free Trade Area terhadap Penerimaan Perpajakan*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/03/27/123509660066376-dampak-penerapan-free-trade-area-terhadap-penerimaan-perpajakan>, diakses 18 Mei 2023.
- Safitriani, S. (2014). *Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investment di Indonesia*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 8(1): 93-116.
- Saptono, P. B. & Mahmud, G. (2021). *Macroeconomic Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Southeast Asian Countries*. JDE (Journal of Developing Economies), 6(2), 253–274. <https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.29439>.
- Syadullah, M. (2015). *Governance and Tax Revenue in Asean Countries*. Journal of Social and Development Sciences, 6(2), 76–88. <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i2.845>.
- UNCTAD. (2007). *World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development*. Switzerland: United Nations.
- Verbeek, M. (2000). *A Guide to Modern Econometrics*. New York: John Wiley.
- Walpole, R. E. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists*. Pearson.
- Wickramarachchi, Vipula. (2019). *Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in Developing Countries: The Case of Sri Lanka*. International Journal of Business and Social Science 10: 76–88.
- Widodo, T. (2009). *Comparative advantage: theory, empirical measures, and case studies*. Review of Economic and Business Studies. 4, 57-82.
- World Bank. (2023). *Metadata Glossary: GDP Growth (GDP per capita growth)*. <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/statistical-capacity-indicators/series/5.51.01.10.gdp#:~:text=Metadata%20Glossary&text=Long%20definition-,GDP%20per%20capita%20is%20the%20sum%20of%20gross%20value%20added,GDP%20data%20in%20local%20currency>, diakses 26 Mei 2023.
- World Bank. (2023). *Metadata Glossary: Tax Revenue (% of GDP)*. <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/GC.TAX.TOTL.GD.ZS>, diakses 26 Mei 2023.
- Zeb, N., F. Qiang & M. Sharif. (2014). *Foreign Direct Investment and Unemployment Reduction in Pakistan*. International Journal of Economics and Research 5(02): 10-17.